



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	: 5
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 17 November 2020
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Audiensi terkait penyampaian aspirasi
Ketua Rapat	: <b>Drs. H. Gusparadi Gaus, M.Si./Anggota Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 24 (dua puluh empat) Anggota Komisi II DPR RI dari 48 (empat puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI B. Ketua Forum Komunikasi Abdi Negara Indonesia C. DPP Perhimpunan Karya PNS

## **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Ketua Forum Komunikasi Abdi Negara Indonesia dan DPP Perhimpunan Karya PNS, dengan agenda Audiensi terkait penyampaian aspirasi, hari Selasa, 17 November 2020, dibuka pukul 10.00 WIB oleh Anggota Komisi II DPR RI, Drs. H. Gusparadi Gaus, M.Si., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN**

Pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Ketua Forum Komunikasi Abdi Negara Indonesia dan DPP Perhimpunan Karya PNS, dengan agenda Audiensi terkait penyampaian aspirasi, yaitu:

### **Dengan Forum Abdi Negara Indonesia**

1. Perhimpunan Karya PNS adalah ASN yang telah dilakukan PDTH (Pemberhentian Dengan Tidak Hormat) oleh PPK dan pejabat yang berwenang yang umumnya karena kasus pidana korupsi. Yang terhimpun dalam perkumpulan ini berjumlah kurang lebih 2.000 orang.

2. Komunitas PDTH ini merasa didiskriminasi dan diberlakukan tidak adil oleh PPK terkait. PPK dinilai pilih kasih dalam menegakkan SKB 3 Menteri yang menjadi dasar pemecatan mereka. Banyak kasus pidana yang lebih parah dari mereka dibiarkan dan tidak dilakukan pemecatan.
3. Mereka meminta Komisi II DPR RI untuk menjembatani dengan KemenPANRB terkait ketidakadilan yang mereka alami.

### **Dengan DPP Perhimpunan Karya PNS**

1. Forum ini adalah ASN yang mengalami "pembunuhan karier" karena tidak mendukung kepala daerah yang kemudian menang. Akibatnya, mereka dinonjobkan atau dinonaktifkan tanpa kejelasan.
2. Salah satu contoh adalah kasus ASN pada Pemerintah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu yang merasa karirnya dihambat dan dipersulit untuk mutasi karena tidak berpihak pada bupati terpilih (petahana) pada saat penyelenggaraan Pilkada.
3. Mereka memohon kepada Komisi II untuk dapat memediasi dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan KemenPANRB dan KASN.

### **III. CATATAN RAPAT**

Catatan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Ketua Forum Komunikasi Abdi Negara Indonesia dan DPP Perhimpunan Karya PNS, dengan agenda Audiensi terkait penyampaian aspirasi, yaitu:

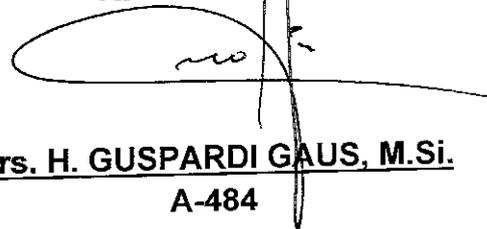
1. Komisi II DPR RI akan meneruskan aspirasi mereka kepada Kementerian PANRB dan BKN dalam Rapat Kerja/RDP yang akan dilaksanakan hari Kamis, 19 November 2020.
2. Terkait dengan ASN yang di PDTH, perlu dipastikan adanya perlindungan (bantuan hukum) bagi mereka sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN.
3. Perlu dipertimbangkan untuk dibuat Panja untuk membahas secara komprehensif terkait permasalahan-permasalahan tersebut.

### **IV. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 11.25 WIB.

Jakarta, 17 November 2020

**KETUA RAPAT**



**Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.**

**A-484**